



RENJA

DINAS PMPTSP

TAHUN 2022



DPMPTSP

KABUPATEN PINRANG



KATA PENGANTAR

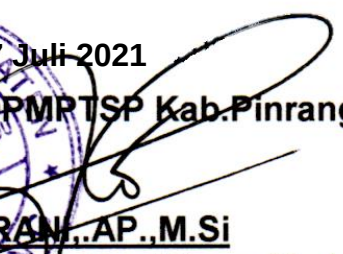
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pinrang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2022.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) 2022 menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan, cepat dan mudah sebagai perwujudan e Governance secara umum serta memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi masyarakat dan pelaku usaha pada khususnya.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2022 ini.

Pinrang, 7 Juli 2021
Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang

ANDI MIRAN, AP., M.Si
Rangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19740603 199311 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		8
1.4 Sistematika Penulisan.		8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP (DPMPTSP)		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP		10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP		55
3.3 Program dan Kegiatan		57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		70
BAB V PENUTUP		
5.1 Catatan Penting		79
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan		79
5.3 Rencana Tindak Lanjut		80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2022, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pinrang, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun ke 3 (tiga) periode RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang. Renja DPMPTSP memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian Kerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pelayanan merupakan salah satu bentuk wujud dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penerapan pelayanan prima yang efektif, efisien dan berbasis elektronik sehingga pelayanan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus naik serta meningkatnya permintaan ruang membuat masyarakat di Kabupaten Pinrang sangat butuh pelayanan yang mudah, cepat dan transparan yang tidak membutuhkan banyak birokrasi yang berbelit-belit. Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah

Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan efektif sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membentuk Kantor Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (KP3KP) merupakan pusat kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan. Pusat Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha serta Pelayanan Perizinan Penanaman Modal,. Sehingga dengan terbentuknya KP3KP dapat memudahkan masyarakat umum dan para investor untuk memenuhi kebutuhannya. Kantor P3KP berada dalam satu atap dengan menerapkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 25) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);

- 34) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang.
- 35) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Pinrang Nomor 27 tahun 2020);
- 36) Revisi Rencana Startegis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- Sebagai dasar/pijakan dan rujukan dalam menyusun RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2022;
- Dokumen Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2020 harus bersinergis dengan RPJP Kabupaten Pinrang 2019-2029, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, Perubahan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024
- Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian Kerja tahun sebelumnya.
- Menyiapkan kerangka evaluasi Kerja bagi Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang
- Renja DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 bertujuan untuk membangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Menjelaskan secara ringkas latar belakang perlunya penyusunan Renja-SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP tahun lalu, menganalisis kinerja perangkat Dinas PMPTSP, menjelaskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP serta mereview rancangan awal RKPD Dinas PMPTSP serta menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB III menelaah kebijakan nasional yang terkait Dinas PMPTSP memuat tujuan dan sasaran Renja yang akan dicapai serta program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang pada tahun 2022

BAB IV membuat uraian dan tabel rencana kerja serta pendanaan di Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang

BAB V Penutup yang menjelaskan tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Renja n-1

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan rata-rata capaiannya 95,75%
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan yang rata-rata capaiannya 99,93 %
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan rata-rata capaiannya 99,96 %
4. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan capaiannya 100 %
5. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan rata-rata capaiannya 96,79%
6. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan rata-rata capaiannya 93,97.%
7. Program Informasi Dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan rata-rata capaiannya 100 %
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan rata-rata capaiannya 99,98 %.

Sedangkan dalam evaluasi pelaksanaan pencapaian Renja tahun lalu diuraikan pada penjelasan dibawah ini tetapi dalam kajian (review) pencapaian renja tahun n-1 dan perbandinganya baru pada tahap triwulan pertama tahun 2021, uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari :
-

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0 %
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 7,96 %
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 16,24%
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 45,41%
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 26,06%
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0%
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 23,45%
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 2,07 %
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 0 %
 3. Program Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan capaiannya 25%
 4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan capaiannya 12,50 %
 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan capaiannya 0%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari :
- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 33,33%.

Dari hasil evaluasi terhadap Renja Dinas PMPTSP tahun 2020 (n-2) dan tahun 2021 (n-1) dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

NO.	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASAR AN,PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renja Tahun
				2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai LKJIP	71,6 4	71,5	-					Nilai SAKIP	71,5
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	72,0 1	72,01	-					Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	72,05
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	83,87	84,40	-					Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	84,9
		URUSAN RUTIN SKPD										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi			-				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah rekening, layanan telepon, listrik yang terbayarkan tepat	12 bln	4 rekening	12 bln	4 Rekenig	100%	100%	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	

		Daya Air dan Listrik	waktu							Perangkat Daerah	dan Penganggaran Yang Disusun	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah surat tanda nomor (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	3 Unit	3 STNK	3 Unit	3 STNK	100%	100%	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA 2022	3 Dokumen
		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	3 dok	97 %	3 dok	16 Jasa	100%	100%	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2022	1 Dokumen
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	2 Keg	2 org	2 Keg	2 Orang	100%	100%	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2021	1 Dokumen
		Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA 2022	1 Dokumen
		Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	3 item	16 Jenis Barang	3 item	2 Alat	100%	100%	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2021	1 Dokumen

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teralaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	47 kali	50 Kali	50 kali	47 Kali	106%	94%	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD, SPI P dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, penggandaan/fotocopy, makan minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 bln	5 jenis	12 bln	5 jenis	100%	100%	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	
	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 bln	3 orang	12 bln	2 Orang	100%	67%	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi				100%			02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, penggandaan/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7 item
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2 item	3 Jenis	2 item	1 Item	100%	33%	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	18 jasa

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	6 item	3,00 Jenis	6 item	3 Jenis	100%	100%	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 item	5,00 Jenis	3 item	0	100%	-	07 Koordinasi dan Penyusunan Lap.Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 laporan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 Paket	2 Paket Pekerjaan	1 Paket	-	100%	-	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah suku cadang kendaraan dinas yang diganti sesuai analisa kebutuhan	4 item	3 kendaraan	4 item	3 Kend. Dinas	100%	100%	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 orang
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	12 Unit	10,00 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	100%	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya	

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	10 Unit	3,00 Item	10 Unit	2 Item	100%	67%	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	136 Pasang
	Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	1,00 Gedung	1 Paket	-	100%	-	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	7 kegiatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	71,01	71,05	71,64	-	101%		11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga n	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	3 laporan
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dok	1,00 Dok	1 Dok	2 Dok	100%	200%	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 Lap	2 lap	2 Lap	2 Lap	100%	100%	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai	1 Paket

										analisa kebutuhan	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7 jenis barang
	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dok	Dokumen	3 Dok	3 Dokumen	100%	100%	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	50 Kali
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang tercapai nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	60 pasang	120 pasang	60 pasang	120 Pasang	100%	100%	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	4 jenis barang

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	25 Orang	20 pasang	25 Orang	4 Orang	100%	100%	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 jenis barang
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	84,40	84,40	84,40	-			09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	1 paket pekerjaan
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah informasi investasi penanaman modal	3 Keg	3 keg.	3 Keg	2 kegiatan	100%	67%	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah realisasi laporan LKPM, PMDN, dan PMA	6 Pek	6 lap	6 Pek	2 Laporan	100%	33%	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan listrik	4 rekening
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi dalam provinsi dan luar provinsi	2 Kali	3 pameran	2 Kali	2 Pameran	100%	67%	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	5 jenis

	Penyusunan Buku Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Buku Rancangan Umum Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tim satgas.	1 Keg	2 keg.	1 Keg	2 kegiatan	100%	100%	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	3 kendaraan dinas
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Nilai Realisasi investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.020.259.289.317 dan Nilai	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.080.259.423.000 dan	Nilai Realisasi PMDN - Rp.1.729.696.956.068 dan	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.764.011.673.880 dan	170%	163%	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	4 jenis barang
			Realisasi PMA \$ 39.411.395,18	Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.000	Nilai Realisasi PMA \$ 88.264.650	Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.000	224%				

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi	Jumlah Penyelenggaraan Investment Forum (FIP)	2 Keg	3 keg.	2 Keg	-	100%	-	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	2 paket pekerjaan
	Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal	Jumlah penggunaan aplikasi SIP dan pengembangan website DPMPTSP	2 Pek	3 Aplikasi	2 Pek	2 Pek	100%	66,67 %	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 1.188.285.365.300 dan \$ 50.195.200
	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di daerah	Jumlah Laporan Penerbitan Perizinan	-	-	-	-	-	-	a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan pengaduan dan layanan perizinan ke masyarakat	6 Keg	6 keg.	6 Keg	1 keg.	100%	16,67 %	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	1 paket pekerjaan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan	12 lap	12 lap	12 lap	12 Laporan	100%	100%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Wirausaha yang memanfaatkan Layanan Perizinan	93%
	Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat	Persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan	90%	93%	90%	93%	100%	100%	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		

	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	Jumlah informasi layanan perizinan melalui media elektronik dan brosur	3,00 keg.	3,00 keg.	3,00 keg.	3 Kegiatan	100%	100%	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	2 Kegiatan
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standart pelayanan (SP)	1.031	1.031	4.379	2.159	4,25	2,09	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	4 Kali
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah bimtek PTSP, service excellence, in house training, dan sosialisasi layanan masyarakat	3 keg	3 keg	3 keg	3 Keg.	100%	100%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	2150
	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah laporan kearsipan	2 lap.	2 lap.	2 lap.	1 keg.	100%	50%	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan layanan jemput bola, one day service	12 bln	4 lap	12 bln	4 Lap	100%	100%	01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Updating dan Pemeliharaan Aplikasi	2 Kegiatan
-									02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	4 kegiatan
									03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan usaha PM secara berkala	4 laporan
									04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	5 kegiatan
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,9

-	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	
-	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP	3 kegiatan
-	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan	7 kegiatan
-	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	4 kegiatan
-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	PMDN : 1300 PMA : 2

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	
--	---	--

Tabel 2.2. Evaluasi Anggaran Terhadap Hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2021

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai LKJIP	71,64		71,5	-				Nilai SAKIP	
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	72,01		72,01	-				Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	83,87	84,40	-					Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	
	URUSAN RUTIN SKPD										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah surat tanda nomor (STNK) utkkendaraan dinas/operasional yg tersedia dan terbayarkan tepat waktu	2.250.000	2.250.000	2.250.000	1.638,000	100%	7,28%	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA 2022	6.435.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah surat tanda nomor (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	2.250.000	3.500.000	2.250.000	1.638,000	100%	7,28%	0 Penyusunan 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA 2022	3 Dokumen
	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	133.340.000	132.812.000	133.295.000	113.032,000	100%	8,51%	0 Koordinasi dan 2 Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2022	6.195.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	18.199.000	18.199.000	18.199.000	18.199,000	100%	10,00%	0 Koordinasi dan 3 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2021	2.060.000
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	4.500.000	5.000.000	-	2.000,000	100%	4,00%	0 Koordinasi dan 4 Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA 2022	2.835.000
	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	15.150.000	16.500.000	15.130.000	9.800,000	100%	5,94%	0 Koordinasi dan 5 Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2021	7.290.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teralaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	190.000.000	217.520.000	189.994.000	113.000,000	0%	5,19%	0 Koordinasi dan 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP,LPPD,SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, penggandaan/fotocopy, makan minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	362.791.000	392.586.000	350.012.000	231.465,000	100%	5,90%	b Administrasi . Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	
	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	17.700.000	20.100.000	17.700.000	20.100,000	100%	10,00%	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	2.735.966.807
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK,kegiatan makan minum,penggandaan/fotocopy,cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	336.741.500

Renja Tahun 2022- DPMPPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	92.500.00 0	Rp 27.300.00 0	92.340.000	1.500	100%	0,55%	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	133.870.100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	141.500.0 00	Rp 40.000.00 0	141.467.00 0	43.200	100%	10,80%	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	6.305.000
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubleur kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	45.200.00 0	Rp 75.250.00 0	45.056.000	-	100%	-	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1.360.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	30.000.00 0	Rp 60.000.00 0	29.860.000	-	100%	-	c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah suku cadang kendaraan dinas yang diganti sesuai analisa kebutuhan	39.700.000	Rp 30.200.000	22.712.000	22.663	100%	7,50%	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	11.700.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	2.200.000,00	Rp 4.000.000	2.200.000	4.000	100%	10,00%	d Administrasi . Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	4.800.000	Rp 10.000.000	4.680.000	2.995	100%	3,00%	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	35.700.000
Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	70.000.500	Rp 170.000.000	-	-	100%	-	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	3.975.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	71,01	71,05	71,64	-	101%		1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimtektenis implementasi peraturan perundang-undangan yg dilaksanakan secara efektif & efisien sesuai analisa kebutuhan	41.650.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	3.360.000	6.000.000	3.360.000	3.360,000	100%	5,60%	e Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1.855.000	5.000.000	1.855.000	2.035,000	100%	4,07%	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7.610.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	5.608.000	7.500.000	5.608.000	5.101,000	100%	6,80%	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7.632.000
	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	41.926.00 0	37.500.00 0	36.099.000	7.292,000	100%	1,94%	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	97.299.900
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase sumber daya aparatur yang tercapai nilai SKP baik	100%	100%	100%	2.000,000	100%	100%	f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa	

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	Aparatur								Pemerintah Daerah	kebutuhan	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	36.000.000	40.000.000	37.000.000	36.000,000	100%	9,00%	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	4.400.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	208.000.000	380.000.000	101.990.000	40.183,000	100%	1,06%	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	91.250.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	84,40	84,40	84,40	-			09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	148.480.000
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah informasi investasi penanaman modal	37.000.000	50.000.000	37.000.000		100%	0,00%	g . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah realisasi laporan LKPM, PMDN, dan PMA	102.150.000	102.600.000	101.990.000	13.280,000	100%	1,29%	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan listrik	7.610.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi dalam provinsi dan luar provinsi	77.316.000	350.000.000	66.964.000	27.482,000	100%	0,79%	0 Penyediaan Jasa 4 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	279.165.000
	Penyusunan Buku Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Buku Rancangan Umum Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tim satgas.	18.310.000	25.600.000	12.935.000	4.924,000	100%	1,92%	0 Penyediaan Jasa 2 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	88.687.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Nilai Realisasi investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.020.259.289.317 dan Nilai	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.080.259.423.000 dan	Nilai Realisasi PMDN - Rp.1.729.696.956.068 dan	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.764.011.673.880 dan	170%	163%	0 Pemeliharaan 6 Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	10.170.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
		Nilai Realisasi investasi PMDN dan PMA	Realisasi PMA \$ 39.411.39 5,18	Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.00 0	Nilai Realisasi PMA \$ 88.264.650	Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.00 0	224%				
	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi	Jumlah Penyelenggaraan Investment Forum (FIP)	161.000.0 00	250.000.0 00	144.164.000	-	100%	-	1 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	170.000. 000
	Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal	Jumlah penggunaan aplikasi SIP dan pengembangan website DPMPTSP	210.000.0 00	321.000.0 00	160.825.000	100.719,0 00	100%	3,14%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	50.000.000
	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di daerah	Jumlah Laporan Penerbitan Perizinan	91.950.00 0		-				a Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	50.000.000
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan pengaduan dan layanan perizinan ke masyarakat	91.950.00 0	33.904.00 0	86.202.000	33.902,00 0	100%	2,69%	0 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	50.000.0 00

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan	26.000.00 0	42.970.00 0	12.935.000	8.800,000	100%	100%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Wirausaha yang memanfaatkan Layanan Perizinan	144.478. 000
	Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat	Persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan	90%	93%	90%	93%	100%	100%	a Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		144.478. 000
	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	Jumlah informasi layanan perizinan melalui media elektronik dan brosur	-	125.000.0 00	-	21.520,00 0	100%	1,72%	0 Penyusunan 1 Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	17.000.0 00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standart pelayanan (SP)	1.031	1.031	4.379	2.159	4,25	2,09	0 Pelaksanaan 2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	488.484.000

Renja Tahun 2022- DPMPPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prog./Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah bimtek PTSP, service excellence, in house training, dan sosialisasi layanan masyarakat	151.250.0 00	165.000.0 00	82.650.000	37.785.0 00	37.785,000	100%	2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	521.000.000
	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah laporan kearsipan	22.430.00 0	24.500.00 0	22.075.000	10.980.00 0	10.980,000	100%	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		521.000.000
	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan layanan jemput bola, one day service	411.250.0 00	464.000.0 00	407.530.000	277.950,0 00	100%	5,99%	0 Penyediaan 1 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Updating dan Pemeliharaan Aplikasi	140.000.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prog./Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Pemantauan 2 Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	12.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Penyediaan 3 Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan usaha PM secara berkala	12.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service,Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	267.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN P.MODAL	Jumlah IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prog./Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a Pengendalian Pelaksanaan PM Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	252.033.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM,SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan	37.960.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM,perizinan usaha secara OSS,Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	40.100.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	8.500.000

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PR OGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prog./Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,P ROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-
			2019	2020	2019	2020	2019	2020			2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	9.020.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan & Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab./Kota	Tersedianya aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	9.020.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terint egrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan digitalisasi arsip perizinan usaha dan non usaha PM	9.020.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional.

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, DPMPTSP Kabupaten Pinrang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal serta perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang 2019 -2021

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Targrt Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analis
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Nilai LKjIP	71	72	73	73,5	71,61	73,	73	73,5	-
	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	71	72	73	73,5	-	-	73	73,5	-
	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84	84	85	85	85,50	89,87	85	73,5	-
	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2000 - Perizinan Non Usaha 1239	- Perizinan Usaha 2000 - Perizinan Non Usaha 1239	- Perizinan Usaha 2500 - Perizinan Non Usaha 1420	- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	- Perizinan Usaha 2000 - Perizinan Non Usaha 1239	- Perizinan Usaha 2249 - Perizinan Non Usaha 1266	- Perizinan Usaha 2249 - Perizinan Non Usaha 1266	- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	-
	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	-PMDN : 1.020.259.289.317 -PMA : \$ 39.411.395,18	-PMDN : 1.080.259.423.000 -PMA : \$ 45.632.000	-PMDN: 1.105.632.540.000 -PMA: \$ 54.230.040	-PMDN: 1.325.006.000.000 -PMA: \$ 58.922.300	PMDN:1.764.011.673.880 -PMA: \$ 131.212.088	PMDN:1.764.011.673.880 -PMA: \$ 131.212.088	PMDN:1.764.011.673.880 -PMA: \$ 131.212.088	-PMDN: 1.325.006.000.000 -PMA: \$ 58.922.300	-
	Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	1100 3	1100 3	1504 3	1920 3	1031 3	2031 4	1504 3	1920 3	-
	Jumlah Tenaga Kerja	2.052	2.159	2.266	2.379	-	-	2.266	2.379	-

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan isu strategis daerah Kabupaten Pinrang terkait Investasi dan pelayanan public adalah Implementasi e –Government dalam rangka peningkatan layanan public dan pemenuhan pelayanan dasar hal ini terkait pada penjabaran Misi pertama dan keempat RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dan keterkaitannya dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yaitu Misi Pertama **“Memantapkan system birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.** Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan system birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance) dan Misi Kedua **“Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.** Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat. pencapaiannya melalui indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan **“Paket Kebijakan Investasi”** (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan aplikasi **“SIAP BOSS”** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan berbasis OSS) serta aplikasi **“RAJIN”** (Gerai Perizinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa) dan

Peningkatan Nilai Investasi dengan memberikan kemudahan,fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi melalui **FIP (Forum Investasi Pinrang)**. Pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi **SIAP BOSS, KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM kapital dan teknikal dalam pengembangan usaha sedangkan tujuannya adalah mengkolaborasikan potensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. **JABAT ERAT** merupakan kerjasama antara Investor PMDN dan PMA dengan Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM).

Terkait Misi pertama dan kedua tersebut diatas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil),belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh. Penerapan sistem OSS (Online Single Submission) oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan) yang belum stabil serta sarana prasarana penunjang system tersebut masih kurang memadai sehingga sangat menghambat dalam proses penerbitan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan, Penyesuaian aplikasi yang baru dalam proses penerbitan perizinan masih terus dilakukan dengan mengkondisikan sarana dan prasana yang tersedia dan sumber daya manusia yang ada . Terbatasnya data dan Informasi potensi unggulan untuk pendukung kegiatan FIP, masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya

di Kabupaten Pinrang, Kurangnya promosi terkait potensi unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pinrang.

Dampak yang terjadi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah peningkatan layanan perizinan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE, yang didukung oleh Aplikasi **Tracking System** yaitu aplikasi yang terintegrasi mulai dari front office, back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin.

Keberadaan DPMPTSP merupakan suatu kemajuan besar kebijakan daerah di bidang penanaman modal, dimana tidak ada lagi resistensi antara SKPD teknis dan lebih efektif menjalankan kebijakan di bidang penanaman modal serta adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Kepala Dinas PMPTSP terkait penerbitan izin. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan di bidang penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan daerah. Adapun capaian realisasi PMD dan PMA pada tahun 2019-2020 nilai rata-ratanya 287% dan Penanaman Modal Asing capaiannya pada tahun 2019-2020 nilai rata-ratanya 163 %, dan meningkatnya investor/proyek PMDN pada tahun 2019-2020 nilai rata-rata capaiannya adalah 185% dan PMA capaiannya pada tahun 2018-2019 nilai rata-ratanya 133%, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usahanya dengan membuat dan mengurus sendiri izinnya tanpa melalui CALO.

Tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah makin meningkatnya persaingan global dan makin heterogennya masyarakat Pinrang dalam perkembangan yang terjadi saat ini sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang harus mampu menjawab tantangan perkembangan ini dengan peningkatan layanan dan peningkatan realisasi investasi dengan memberikan kemudahan, fasilitasi dan kerjasama di bidang investasi melalui program dan kegiatan serta inovasi yang berpihak kepada masyarakat usaha dan investor PMDN dan PMA. Adapun

kegiatan dan inovasi yang dilakukan adalah Inovasi **“SIAP BOSS”** adalah Sistem Informasi dan aplikasi Perizinan berbasis OSS, **Forum Investasi Pinrang (FIP)** merupakan forum di tingkat pusat dalam rangka menarik minat investor. Inovasi **“RAJIN” (Gerai Perizinan)** adalah peningkatan layanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta peningkatan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang layanan perizinan berbasis online terkait dengan pelaksanaan e- integrasi system pelayanan perizinan Penanaman Modal,

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan /UpGardening Aplikasi SIAP BOSS, dibentuknya Satgas Percepatan realisasi LKPM yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum Investasi bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten, Penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihan yang mengacu pada aktivitas unit layanan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan

monitoring tahun sebelumnya atau n-1 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dengan 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.258.539.807 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) Uraian tersebut dapat dilihat pada table T-C.31 dibawah ini.

Tabel T_C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi Sulewesi Selatan Kabupaten Pinrang

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.062.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.235.966.807	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.885.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				945.858.000	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				300.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				184.800.000	
	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi	3 Investor	250.000.000	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi	3 Investor	184.800.000	
	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				250.000.000	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				184.800.000	
	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	1 peta	50.000.000	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	1 peta	-	
	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				50.000.000	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				-	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				80.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				144.478.000	
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Terselenggaranya Pameran Investasi	4 Pameran	80.000.000	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Terselenggaranya Pameran Investasi	4 Pameran	144.478.000	
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				20.000.000	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				17.000.000	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				127.478.000	

Renja Tahun 2022- DPMP7SP
Kabupaten Pinrang

3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				620.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				521.000.000	
	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah informasi layanan perizinan	3 Informasi Layanan	620.000.000	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah informasi layanan perizinan	3 Informasi Layanan	521.000.000	
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				200.000.000	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				140.000.000	
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				105.000.000	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				102.000.000	
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				15.000.000	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				12.000.000	
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				300.000.000	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				267.000.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				135.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				86.560.000	
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Laporan SKM dan LKPM	2 Laporan	135.000.000	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Laporan SKM dan LKPM	2 Laporan	86.560.000	
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				50.000.000	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				37.960.000	
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				70.000.000	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				40.100.000	
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				15.000.000	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				8.500.000	

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				750.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				9.020.000	
	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah aplikasi berbasis IT	2 Aplikasi	750.000.000	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah aplikasi berbasis IT	2 Aplikasi	9.020.000	
			Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi	4 Kegiatan				Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi	4 Kegiatan		
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				750.000.000	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				9.020.000	
	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.177.200.000	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.290.108.807	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.177.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.290.108.807	
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	8 Dokumen	36.500.000	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	8 Dokumen	42.060.000	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	5 Dokumen				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	5 Dokumen		
	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				10.000.000	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				22.000.000	
	2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				15.000.000	2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				8.060.000	
	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				8.000.000	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				-	
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000	

Renja Tahun 2022- DPMPTSP
Kabupaten Pinrang

	b.	Administrasi Keuangan	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2.760.700.000	b.	Administrasi Keuangan	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2.750.049.807	
				Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran	6 Dokumen					Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran	6 Dokumen		
				Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Laporan					Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Laporan		
				Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan					Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.750.000.000		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.735.966.807	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.500.000		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.250.000	
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				2.500.000		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				1.225.000	
		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5.700.000		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				4.608.000	
	c.	Administrasi Umum	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	21 Sub Kegiatan	1.194.000.000	c.	Administrasi Umum	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	21 Sub Kegiatan	1.361.999.000	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.500.000		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.380.000	
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	
		4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				2.500.000		4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				19.800.000	
		5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				135.000.000		5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				2.250.000	
		6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18.500.000		6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				136.000.000	
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor				150.000.000		7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18.199.000	

Renja Tahun 2022- DPMP7SP
Kabupaten Pinrang

	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				120.000.000	8. Penyediaan Alat Tulis Kantor				112.960.000	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.640.000	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman				125.000.000	11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.500.000	
	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				250.000.000	12. Penyediaan Makanan dan Minuman				291.000.000	
	13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				50.000.000	13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				217.520.000	
	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				30.000.000	14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	
	15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				45.000.000	15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				27.300.000	
	16. Pengadaan Mebeleur				50.000.000	16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				40.000.000	
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000	17. Pengadaan Mebeleur				75.250.000	
	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				31.000.000	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000	
	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				5.000.000	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				30.200.000	
	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				7.000.000	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				4.000.000	
	21. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				50.000.000	21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				10.000.000	

	d.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian	100%	186.000.000	22. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				170.000.000	
				Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya	100%		d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian	100%	136.000.000	
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				36.000.000			Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya	100%		
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				150.000.000	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				36.000.000	
							2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100.000.000	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang tidak ada usulan dari pelayanan provinsi ,LSM dan asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Renstra BKPM Tahun 2020-2024. sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) uraiannya sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ini mencakup upaya pokok ***mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).***

a) Tujuan

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).

b) Sasaran

- 1) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja
- 2) Meningkatnya aspek legalitas perizinan

2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

a) Tujuan

- 1) Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah

b) Sasaran

- 1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
- 2) Meningkatnya penanaman modal

Adapun Tujuan Dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas PMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kerja 2022
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKjIP	73,5
2.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85
			Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740
3.	Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya Reaslisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	- PMDN: 1.944.822.870.453 - PMA: \$ 144.661.327
		Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	2.239 6
			Jumlah Tenaga Kerja	2.239

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

1.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

1.1.3 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - n. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - o. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - p. Pengadaan Mebeleur
 - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - u. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
- 1.1.4 Sub Kegiatan
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Kegiatan

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1 Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1 Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1 Kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PT SP Kabupaten Pinrang (kebutuhan pengisian SIPD-RKPD) nilai pagu indikatif 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	Rencana Tahun 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2022			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP	Kec.Wt.Sawitto	73,5				74	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Kec.Wt.Sawitto	73,5				74	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.725.966.307				6.726.803.761
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun		11 Dokumen	32.715.000	DAU		11 Dokumen	42.529.500
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA 2022	Kec.Wt.Sawitto	3 Dokumen	8.800.000	DAU		3 Dokumen	11.440.000
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAT ahun 2022	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	5.380.000	DAU		1 Dokumen	6.994.000
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2021	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	6.200.000	DAU		1 Dokumen	8.060.000

	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA2022	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	2.200.000	DAU		1 Dokumen	2.860.000
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA2021	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	2.835.000	DAU		1 Dokumen	3.685.500
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP,LPPD,SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	4 Dokumen	7.300.000	DAU		4 Dokumen	9.490.000
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100 %	3.330.851.307	DAU		100 %	4.901.154.261
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Wt.Sawitto	14 Bulan	2.855.237.807	DAU		14 Bulan	4.282.856.711
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK,kegiatan makan minum,penggunaan/fotocopy,cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	7 jenis kegiatan	337.568.500	DAU		7 item	438.839.050
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	18 jasa	130.000.000	DAU		18 jasa	169.000.000
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	1 laporan	6.545.000	DAU		1 laporan	8.508.500

		07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	1.500.000	DAU		2 laporan	1.950.000
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD		100 %	11.700.000	DAU		100 %	15.210.000
		05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang	11.700.000	DAU		2 orang	15.210.000
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %	139.700.000	DAU		100 %	181.610.000
		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	Kec.Wt.Sawitto	136 Pasang	35.700.000	DAU		137 Pasang	46.410.000
		03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	7 kegiatan	4.000.000	DAU		8 kegiatan	5.200.000
		11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 kegiatan	100.000.000	DAU		4 laporan	130.000.000

	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan		3 pekerjaan	136.000.000	DAU		3 pekerjaan	176.800.000
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	1 Paket	8.000.000	DAU		1 Paket	10.400.000
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	7 jenis barang	8.000.000	DAU		8 jenis barang	10.400.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	50 Kali	120.000.000	DAU		55 Kali	156.000.000
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan		9 jenis barang dan paket pekerjaan	600.000.000	DAU		12 jenis barang dan paket pekerjaan	780.000.000
	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis barang	10.000.000	DAU		5 jenis barang	13.000.000
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis barang	90.000.000	DAU		5 jenis barang	117.000.000
	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	1 paket pekerjaan	500.000.000	DAU		2 paket pekerjaan	650.000.000

		g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor		100 %	315.000.000	DAU		100 %	409.500.000
		02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon,Internet,SMS dan listrik	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis	35.000.000	DAU		4 jenis	45.500.000
		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	5 jenis	280.000.000	DAU		5 jenis	364.000.000
		h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan		10 jenis pekerjaan	160.000.000	DAU		11 jenis pekerjaan	220.000.000
		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	3 kendaraan dinas	85.000.000	DAU		4 kendaraan dinas	110.500.000
		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis barang	15.000.000	DAU		4 jenis barang	19.500.000
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	Kec.Wt.Sawitto	3 paket pekerjaan	60.000.000	DAU		3 paket pekerjaan	90.000.000

Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	Proyek PMDN 1920 Proyek PMA 3	75.000.000	DAU		Proyek PMDN 2100 Proyek PMA 3	97.500.000
		a. Penetapan pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal		100 %	-	DAU		100 %	-
		01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman	Jumlah kebijakan daerah menangani pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	2 kebijakan	-	DAU		2 kebijakan	-
		02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	-	DAU		2 laporan	-
		b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Investasi daerah		2 pekerjaan	75.000.000	DAU		2 paket pekerjaan	97.500.000
		01. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	-	DAU		-	-
		02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Kec.Wt.Sawitto	1 paket pekerjaan	75.000.000	DAU		1 paket pekerjaan	97.500.000

		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Penanaman Modal Jumlah proyek PMDN dan PMA Jumlah Tenaga Kerja	Kec.Wt.Sawitto	PMDN : 1504 PMA : 3 2.379	515.000.000	DAU		PMDN : 1504 PMA : 3 2.497	669.500.000
	(BIDANG PROMOSI)	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		6 Kegiatan	515.000.000	DAU		6 Kegiatan	669.500.000
	(BIDANG PROMOSI)	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	Kec.Wt.Sawitto	2 Kegiatan	15.000.000	DAU		2 Kegiatan	19.500.000
	(BIDANG PROMOSI)	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	Kec.Wt.Sawitto	4 kegiatan	500.000.000	DAU		4 kegiatan	650.000.000
Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e- governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	225.000.000	DAU		- Perizinan Usaha 2900 - Perizinan Non Usaha 1800	292.500.000
		a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel		100 %	225.000.000	DAU		100 %	292.500.000

		01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Kec.Wt.Sawitto	2 Kegiatan	30.000.000	DAU		3 Kegiatan	39.000.000
		02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitto	4 kegiatan	30.000.000	DAU		5 kegiatan	39.000.000
		03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Persuahaan PMA dan PMDN yang ditindak lanjuti serta Aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM	Kec.Wt.Sawitto	4 laporan	15.000.000	DAU		5 laporan	19.500.000
		04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service,Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Kec.Wt.Sawitto	5 kegiatan	150.000.000	DAU		5 kegiatan	195.000.000
Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Kec.Wt.Sawitto	- PMDN: 1.325.006.000.000	80.000.000	DAU		PMDN: 1.632.546.000.000	104.000.000
		a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah,Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian,pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal		100 %	80.000.000			100 %	104.000.000
		01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM,SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	Kec.Wt.Sawitto	3 kegiatan	30.000.000	DAK	-	4 Kegiatan	39.000.000

		02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	Kec. Wt. Sawitto	3 kegiatan	30.000.000	DAU	-	4 kegiatan	39.000.000
		03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	Kec. Wt. Sawitto	7 kegiatan	20.000.000	DAU		8 kegiatan	26.000.000
Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	Kec. Wt. Sawitto	85	100.000.000	DAU		86	130.000.000
		a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kec. Wt. Sawitto	100 %	100.000.000	DAU		100 %	130.000.000
		01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan penyajian dan pemanfaatan data serta peningkatan operasional dan pemeliharaan aplikasi	Kec. Wt. Sawitto	3 kegiatan	100.000.000	DAU		4 kegiatan	130.000.000
	TOTAL RENCANA ANGGARAN					5.720.966.307				8.020.303.761

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan DPMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Nomor	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	Rencana Tahun 2022		SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.725.966.307	
1.1 a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun		11 Dokumen	32.715.000	DAU
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA 2022	Kec.Wt.Sawitto	3 Dokumen	8.800.000	DAU
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2022	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	5.380.000	DAU
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2021	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	6.200.000	DAU
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA 2022	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	2.200.000	DAU
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA 2021	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	2.835.000	DAU
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP, LPPD, SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	4 Dokumen	7.300.000	DAU

1.2	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan		100 %	3.330.851.307	DAU
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Wt.Sawitto	14 Bulan	2.855.237.807	DAU
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, penggandaan/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	7 item	337.568.500	DAU
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	18 jasa	130.000.000	DAU
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	1 laporan	6.545.000	DAU
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	1.500.000	DAU
1.3	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD		100 %	11.700.000	DAU
	05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang	11.700.000	DAU

1.4	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %	139.700.000	DAU
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	Kec.Wt.Sawitto	136 Pasang	35.700.000	DAU
	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	7 kegiatan	4.000.000	DAU
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	3 laporan	100.000.000	DAU
1.5	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan		3 pekerjaan	136.000.000	DAU
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	1 Paket	8.000.000	DAU
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	7 jenis barang	8.000.000	DAU
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	50 Kali	120.000.000	DAU

1.6 f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan		9 jenis barang dan paket pekerjaan	600.000.000	DAU
	05 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	Kec. Wt. Sawitto	4 jenis barang	10.000.000	DAU
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kec. Wt. Sawitto	4 jenis barang	90.000.000	DAU
	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Kec. Wt. Sawitto	1 paket pekerjaan	500.000.000	DAU
1.7 g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor		100 %	315.000.000	DAU
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan listrik	Kec. Wt. Sawitto	4 jenis	35.000.000	DAU
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kec. Wt. Sawitto	5 jenis	280.000.000	DAU
1.8 h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan		10 jenis pekerjaan	160.000.000	DAU
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan, jasa sopir, jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	Kec. Wt. Sawitto	3 kendaraan dinas	85.000.000	DAU

	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis barang	15.000.000	DAU
	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	Kec.Wt.Sawitto	3 paket pekerjaan	60.000.000	DAU
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	Proyek PMDN 1920 Proyek PMA 3	75.000.000	DAU
2.1 a.	Penetapan pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/Intensif di bidang Penanaman Modal		100 %	-	DAU
	01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	2 kebijakan	-	DAU
	02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	-	DAU
2.2 b.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Investasi daerah		2 pekerjaan	75.000.000	DAU
	01. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	-	DAU
	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Kec.Wt.Sawitto	1 paket pekerjaan	75.000.000	DAU

**Renja Tahun 2022– DPMPTSP
KABUPATEN PINRANG**

3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Penanaman Modal Jumlah proyek PMDN dan PMA Jumlah Tenaga Kerja	Kec.Wt.Sawitto	PMDN : 1504 PMA : 3 2.379	515.000.000	DAU
3.1	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		6 Kegiatan	515.000.000	DAU
	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	Kec.Wt.Sawitto	2 Kegiatan	15.000.000	DAU
	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Investasi Pekan Raya Sul Sel, Sulsel Expo, Pinrang Expo, FIP)	Kec.Wt.Sawitto	4 kegiatan	500.000.000	DAU
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	225.000.000	DAU
4.1	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel		100 %	225.000.000	DAU
	01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Kec.Wt.Sawitto	2 Kegiatan	30.000.000	DAU

**Renja Tahun 2022– DPMPTSP
KABUPATEN PINRANG**

	02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitto	4 kegiatan	30.000.000	DAU
	03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Persuahaan PMA dan PMDN yang ditindak lanjuti serta Aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM	Kec.Wt.Sawitto	4 laporan	15.000.000	DAU
	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Kec.Wt.Sawitto	5 kegiatan	150.000.000	DAU
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Kec.Wt.Sawitto	- PMDN: 1.325.006.000.000 - PMA: \$ 58.922.300	80.000.000	DAU
5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal		100 %	80.000.000	
	01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	Kec.Wt.Sawitto	3 kegiatan	30.000.000	DAK
	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	Kec.Wt.Sawitto	3 kegiatan	30.000.000	DAK

**Renja Tahun 2022– DPMPTSP
KABUPATEN PINRANG**

	03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	Kec.Wt.Sawitto	7 kegiatan	20.000.000	DAK
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	Kec.Wt.Sawitto	85	100.000.000	DAU
6.1	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100.000.000	DAU
	01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan digitalisasi arsip perizinan usaha dan non usaha PM	Kec.Wt.Sawitto	3 kegiatan	100.000.000	DAU
TOTAL RENCANA ANGGARAN					5.720.966.307	

Dari uraian tabel rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) program ,14 (Empat Belas) Kegiatan, 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai program sebagai berikut yaitu **Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota** adalah **Rp. 4.725.966.307** dan **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** Rp. 75.000.000, **Program Promosi Penanaman Modal** adalah **Rp. 515.000.000**, **Program Pelayanan Penanaman Modal** adalah **Rp. 225.000.000**, **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** adalah **Rp. 80.000.000**, **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** adalah **Rp100.000.000** sehingga **total anggaran** sebesar **Rp. 5.720.966.307** (**Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah**). dan sumber pendanaannya terdiri dari Dana DAU ,APBD II .

BAB V P E N U T U P

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pinrang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2022.

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. Dengan demikian Setiap bagian dan bidang akan menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga RENJA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 ini dapat diwujudkan secara optimal.

5.2 Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Dinas PMPTSP merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Tahun 2019-2024.
- b. Kepala Dinas PMPTSP berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas PMPTSP sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP.
- c. Dinas PMPTSP berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024.
- d. Merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
- e. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kejadiannya harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil (outcome) yang optimal

yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan dan para investor.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Pinrang dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Pinrang yaitu :

- **SIAP BOSS** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) yang merupakan system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan usaha dan non usaha dan telah dilengkapi dengan penandatanganan elektronik (TTE)
- **RAJIN** (Gerei Perizinan) yang merupakan aplikasi perizinan di Tingkat Desa dan Kelurahan terintegrasi dengan System Informasi Perizinan (SIP) DPMPTSP Kabupaten Pinrang.
- **KONGSI** (Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi) Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **PIF** (Pinrang Invesment Forum) merupakan Forum Investasi yang diadakan dalam rangka menarik minat investor PMDN dan PMA.
- **PIA (Pinrang Investment Award)**
- Melakukan evaluasi dan memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan disetiap bidang dan bagian, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Pinrang, 7 Juli 2021
Kepala DPMPTSP Kab.Pinrang
ANDI MIRAN, AP., M.Si
Rangkar Pembina Utama Muda
Nip. 19740603 199311 2 001

